BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Lamongan

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Lamongan adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan ibukotanya adalah Lamongan. Secara geografis Kabupaten Lamongan terletak di antara 6'51'54"-7'23'06" LS dan 112'33'12" BT dengan batas wilayah administratif adalah sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gresik, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban.

Luas wilayah Kabupaten Lamongan sebesar 181.280 hektar yang terbagi menjadi 27 kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 474 desa/kelurahan. Lamongan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di pantai utara Jawa Timur. Sebagian kawasan pesisir berupa perbukitan. Di bagian tengah terdapat dataran rendah dan di bagian selatan terdapat pegunungan, dan di bagian utara mengalir Bengawan Solo.

2. Iklim

Dengan letak geografis Kabupaten Lamongan di antara 6'51'54"-7'23'06" LS dan 112'33'12" BT, curah hujan di Kabupaten Lamongan tergolong masih cukup banyak yaitu rata-rata sebanyak 1.806 mm selama tahun 2011 dan rata-rata dalam 10 tahun terakhir curah hujan di Lamongan sebesar 36.710 mm/tahun.

3. Tanah

Kondisi topografi suatu daerah dapat ditinjau dari kemiringan tanahnya. Dilihat dari tingkat kemiringan tanahnya, wilayah Kabupaten Lamongan merupakan wilayah yang relatif datar, karena hampir 72,45% tanah di Kabupaten Lamongan memiliki tingkat kemiringan tanah 0-2º. Sedangkan hanya sebagian kecil yang wilayahnya sangat curam, atau kurang dari 1% (0,16%) yang mempunyai tingkat kemiringan tanah 40% lebih yang berada di Kecamatan Sambeng dan Kecamatan Paciran.

4. Penduduk

Berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Catatan Sipil jumlah penduduk Kabupaten Lamongan tahun 2011 mengalami penurunan dibanding tahun 2010 yaitu sebesar 12,94%. Jumlah penduduk tahun 2010 sebesar 1.179.059 jiwa. Kepadatan penduduk dinyatakan dengan jumlah individu per km². Setiap tahunnya jumlah penduduk berubah-ubah dikarenakan ada yang

lahir, ada yang mati, ada yang pergi, ada yang datang. Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Lamongan sebesar 720,4.

B. Gambaran Umum Program Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan (GEMERLAP)

1. Pengertian

GEMERLAP adalah program daerah Kabupaten Lamongan dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa, sekaligus penanggulangan kemiskinan dengan ditandai berkembangannya sentra-sentra industri ekonomi pedesaan sebagai wujud inovasi masyarakat pedesaan yang berkelanjutan.

Empowerment (pemberdayaan) masyarakat adalah upaya meningkatkan kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kualitas kehidupannya. Disadari bahwa masyarakat pedesaan sebagai sasaran program GEMERLAP ini tidak dalam kondisi "Nol", tetapi mereka sudah mempunyai kemampuan dan bekal dasar untuk inovasi dan kemajuan serta perbaikan kehidupannya. Sehingga program GEMERLAP ini bersifat penguatan (*enabling*) yakni menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat bisa berkembang, dan memotivasi atau mendorong (*encourage*), serta membangkitkan kesadaran (*awereness)* akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya.

2. Latar Belakang Munculnya Program GEMERLAP

a. Secara umum mata pencaharian masyarakat Kabupaten Lamongan disektor pertanian (petani, nelayan, peternak, dan pembudidaya ikan), namun dalam proses produksinya belum ditunjang oleh alsinta (alat mesin pertanian) yang memadai.

b. Infrastruktur pedesaan relatif tidak memadai, sehingga masyarakat desa kesulitan dalam mengakses layanan.

c. Terbatasnya kemampuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk, nilai tambah (*value added*) lemah karena biasanya dijual dalam bentuk bahan baku belum hasil olahan.

d. Kelembagaan kelompok dan motivasi wirausaha lemah, serta belum ditunjangnya informasi dalam pemasaran produk.

e. Lemahnya masyarakat dalam mengakses permodalan, karena pada umumnya usaha yang digeluti oleh masyarakat desa bersifat *non bankable.*

f. Kurangnya sarana dan prasarana menampung dan memasarkan hasil yang belum memadai.

3. Maksud Program GEMERLAP

a. Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat pedesaan secara mandiri.

b. Meningkatnya daya beli masyarakat pedesaan melalui peningkatan pendapatan.

4. Tujuan Program GEMERLAP

a. Menggerakkan lebih terencana, terarah dan terukur ekonomi masyarakat pedesaan melalui pemberian bantuan modal (hibah/pinjaman) bergulir, mengefektifkan kelompok-kelompok usaha pedesaan yang sudah ada sebagai basis inovasi, dan merehabilitasi atau membangun sarana dan prasarana ekonomi yang mendukung sistem produksi, distribusi barang dan jasa.
b. Meningkatkan fungsi sarana dan prasarana ekonomi rakyat dengan tetap memelihara kelestarian fungsi lingkungan.
c. Mengembangkan produk unggulan tiap desa, dan menciptakan akses pasar lokal menuju regional, nasional dan global.
d. Meningkatnya peran dan koordinasi SKPD dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan.
e. Meningkatnya kemitraan dan sinergitas stake holders dalam membangun pedesaan yang berkelanjutan.

5. Prinsip Program

GEMERLAP menekankan prinsip – prinsip dasar berikut ini :

a. Seluruh kegiatan harus dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka (*transparency*).
b. Seluruh anggota masyarakat harus berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan dengan berpegang teguh bahwa musyawarah desa sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dalam program (*democracy and participation*).
c. Penyaluran bantuan dana hibah langsung kepada kelompok penerima (*quick disbursement*).
d. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administratif (*accountability*).
e. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat sendiri dalam wadah organisasi masyarakat setempat (*sustainability*).
f. Kebersamaan, kemitraan, dan sinergi antara pemangku kepentingan (*stake holders*) dalam mewujudkan program.
g. Semua aturan, mekanisme, dan prosedur pelaksanaan program GEMERLAP dibuat secara sederhana, fleksibel, mudah dipahami dan mudah dikelola serta dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat.

6. Komponen Program

a. Pengembangan masyarakat, yaitu kegiatan membangun kesadaran kritis, inisiatif dan kemandirian masyarakat atas potensi diri dan

lingkungan yang dimiliki melalui proses pembelajaran yang sesuai dengan tingkatan dan kebutuhannya.

b. Bantuan stimulir, yaitu dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

c. Peningkatan kapasitas, yaitu serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas/kemampuan aparat (daerah, kecamatan, dan desa) dan kelompok peduli guna terciptanya iklim yang kondusif dan sinergi bagi masyarakat sasaran.

d. Pengelolaan dan keberlanjutan program, yaitu capaian kinerja GEMERLAP yang ditandai oleh peningkatan produktivitas ekonomi pedesaan (pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan masyarakat, dan industri rumah tangga masyarakat) dengan didukung pendamping, pengendalian mutu, evaluasi, dan pengembangan program.

7. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan GEMERLAP pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan yang diusulkan dan disepakati masyarakat meliputi :

a. Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan ekonomi masyarakat.

b. Penyediaan sarana, dan material dasar produksi (misal : bibit tanaman/ternak/ikan, bahan baku produksi) serta peralatan-teknologi dasar tepat guna-manfaat bagi peningkatan produktivitas.
c. Penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana ekonomi pada umumnya dan ekonomi pedesaan pada khususnya.
d. Pengembangkan akses informasi pasar seluas-luasnya untuk peningkatan kegiatan ekonomi/produksi masyarakat pedesaan.
e. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal (desa), melalui pelatihan dan pendampingan, serta penerapan tata pemerintahan dan tata usaha ekonomi yang baik (*good governance and good corporate gavernance*).

8. Dasar Hukum

a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
b. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
c. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
d. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

e. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 entang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
k. Peraturan Bupati Kabupaten LAmongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan (GEMERLAP) di Kabupaten Lamongan.
l. Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.

Dari berbagai dasar hukum yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam rangka memberdayakan masyarakat pedesaan untuk mengefektifkan kelompok-kelompok usaha pedesaan yang sudah ada serta mengembangkan produk unggulan tiap desa melalui Kebijakan Program Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan (GEMERLAP) di Desa Tawangrejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesempatan kerja masyarakat pedesaan secara mandiri melalui pemberdayaan. Sehingga kelompok usaha desa yang telah ada menjadi lebih kuat secara kelembagaan dan potensi desa yang dikelola oleh kelompok hasilnya bisa bertambah daripada sebelumnya dan dapat diolah sedemikian rupa.

9. Pelaksanaan Kegiatan

a. Bidang Pertanian

1) Pengadaan sarana dan prasana pertanian.
2) Pengembangan komoditi pertanian.
3) Bantuan modal bagi petani
4) Peningkatan kualitas SDM pertanian
5) Penguatan lumbung pangan.
6) Pengembangan pengolahan hasil.
7) Pengembangan pemasaran produk-produk hasil pertanian.

b. Bidang Peternakan

1) Bantuan modal bagi peternak.
2) Pengembangan kawasan berbasis peternakan.
3) Pembangunan rumah potong hewan.
4) Peningkatan kualitas SDM peternakan.
5) Peningkatan kesehatan hewan.
6) Peningkatan populasi ternak.
7) Pengembangan pemasaran produk-produk hasil peternakan.

c. Bidang Perikanan

1) Bantuan modal bagi pembudidaya/ nelayan.
2) Bantuan sarana dan prasana bagi perikanan tangkap/ budidaya.
3) Pengembangan kawasan berbasis perikanan.
4) Peningkatan kualitas SDM perikanan
5) Pengembangan pengolahan hasil.
6) Pengembangan pemasaran produk-produk hasil pertanian.

d. Bidang Koperasi, Perdagangan dan Industri

1) Bantuan modal bagi koperasi, pedagang dan IKM/ IRT.
2) Bantuan sarana dan prasana bagi Koperasi, Perdagangan dan Industri.
3) Peningkatan kualitas SDM bidang koperasi, perdagangan dan industri.
4) Penguatan kelembagaan koperasi.

5) Fasilitasi promosi produk dan Pengembangkan akses informasi pasar seluas-luasnya untuk peningkatan kegiatan ekonomi/produksi masyarakat pedesaan.
6) Pengembangan kawasan berbasis industri kecil.

f. Bidang Infrastruktur Pedesaan

Penyediaan dan perbaikan sarana/prasarana ekonomi pada umumnya termasuk di dalamnya jalan Kabupaten, jalan poros strategis, jalan desa, jalan produksi, saluran irigasi, air bersih dan penerangan.

C. Profil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan

1. Visi Misi Bappeda Kabupaten Lamongan

Visi Bappeda Kabupaten Lamongan dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan tahun 2010-2015 yaitu "Mewujudkan Masyarakat Lamongan yang Adil, Sejahtera, Beretika dan Berdaya Saing".

Dalam rangka menjabarkan dan melaksanakan visi Kabupaten Lamongan tersebut serta mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, maka Bappeda menetapkan visi 2010-2015 sebagai berikut :

"Terwujudnya Perencanaan Pembangunan

yang Partisipatif dan Akuntabel"

Perencanaan Pembangunan yang Partisipatif

Proses perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodir secara objektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar mampu menghasilkan sebuah perencanaan pembangunan yang lebih baik dan dapat diterima oleh semua pihak. Karenanya dalam setiap proses perencanaan pembangunan dibutuhkan keterlibatan aktif dari masyarakat. Partisipasi masyarakat akan memberikan dampak positif dalam proses pembangunan karena dengan partisipasi tersebut masyarakat memiliki peran yang signifikan sehingga rasa memiliki terhadap setiap hasil pembangunan yang ada akan menjadi lebih besar.

Selain itu proses perencanaan pembangunan yang partisipatif juga harus mengedepankan potensi dan basis lokal (*local wisdom*) masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah akomodatf terhadap dinamika permasalahan dan kebutuhan masyarakat sesungguhnya. Sehingga secara efektif dan efisien perencanaan pembangunan ini dapat mewujudkan Visi Kabupaten Lamongan lima tahun ke depan yakni mewujudkan masyarakat Lamongan yang adil dan sejatera.

Perencanaan Pembangunan yang Akuntabel

Proses perencanaan pembangunan yang akuntabel mengedepankan sebuah proses perencanaan yang dilakukan secara terukur baik kuantitas maupun kualitasnya. Proses sepeti ini akan lebih memudahkan dalam hal pengendalian, karena akuntabilitas dapat berarti memperhitungkan secara secara tepat terhadap semua sumber daya yang dimiliki dalam proses perencanaan yang dilakukan.

Perencanaan pembangunan yang akuntabel dapat memberikan arah yang tepat bagi proses pembangunan daerah sehingga mampu meningkatkan kapasitas daerah dan kapasitas masyarakatnya serta mampu menempatkan diri dalam kerangka perencaan nasional guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional secara umum.

Untuk mewujudkan visi tersebut Bappeda Kabupaten Lamongan telah merumuskan empat misi sebagai berikut :

a) **Memacu responsibilitas perencana pembangunan guna meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan**

Penjelasan :

Perencanaan pembangunan yang berkualitas dapat tercermin dari sikap responsif perencana pembangunan (Bappeda) terhadap setiap kondisi dan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Bappeda akan menjadi ujung tombak

dan berperan lebih aktif dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lamongan lima tahun ke depan.

b) Memacu Produktivitas dan Inovasi dalam Proses Perencanaan Pembangunan

Penjelasan :

Produktivitas dan inovasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah menjadi lebih berarti dalam sistem otonomi daerah seperti saat ini. Produktivitas dan Inovasi yang tinggi dalam proses perencanaan pembangunan akan dapat meningkatkan pengelolaan sumber daya yang dimiliki daerah, sehingga daerah akan dapat bersaing dengan daerah lainnya untuk memajukan wilayahnya masing-masing.

c) Meningkatkan koordinasi, keterpaduan, kerjasama dalam Proses pelaksanaan pembangunan

Penjelasan :

Adanya otonomi daerah memberi peluang bagi daerah untuk mengembangkan daerahnya sesuai dengan karakteristiknya. Namun demikian, pemerintah daerah juga harus memperhatikan pula tujuan pembangunan nasional secara umum, sehingga perencanaan pembangunan di daerah akan terpadu dengan perencanaan pembangunan di tingkat pusat. Untuk mewujudkan hal tersebut

tentunya dibutuhkan koordinasi dan kerja sama yang lebih intensif baik antara Bappeda Kabupaten Lamongan dengan Pemerintah daerah sekitar maupun dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah pusat.

Koordinasi, keterpaduan dan kerjasama juga dibutuhkan di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan sendiri, baik antar institusi pelaksana pembangunan (SKPD) maupun kerjasama dengan pihak swasta dan dengan masyarakat secara langsung. Disinilah peran Bappeda menjadi lebih sentral untuk dapat mengkoordinasikan semua stakeholder (pemerintah, swasta dan masyarakat) tersebut.

d) Meningkatkan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan

Penjelasan :

Pengendalian dan evaluasi dalam perencanaan pembangunan dimaksudkan untuk menjamin konsistensi dokumen perencanaan dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah serta Capaian Kinerja kegiatan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2011-2015).

2. Tupoksi Bappeda Kabupaten Lamongan

Kedudukan dan Tugas

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan sebagai unsur perencana penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perencanaan dan pembangunan daerah.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bappeda mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah ;
2. Penyusunan dokumen-dokumen yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, PPAS dan LKPJ) serta yang terkait dengan kestatistikaan daerah ;
3. Pelaksanaan sinkronisasi penyusunan RAPBD dengan perencanaan pembangunan ;
4. Pemberian dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah ;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Lamongan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

1. Kepala: Drs. Aris Wibawa, MM;
2. Sekretaris: Cacuk Cahyo Purnomo, SE, MM :
    1. Sub Bagian Program: Ir. Sri Mulyati
    2. Sub Bagian Keuangan: Umi Hartati, SE
    3. Sub Bagian Umum dan Pengendalian Evaluasi: Nazaruddin RS, SE, MAP
    4. Bidang Fisik dan Prasarana: Ir. Muhammad Hilmi
        1. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Pariwisata: Galih Yanuar Medi P, SE, M.Si
        2. Sub Bidang Prasarana wilayah dan Perhubungan: Ir. Agust Kusnawijaya
    5. Bidang Ekonomi: Shofiah Nurhayati, Sp, M.Si
        1. Sub Bidang Perekonomian: David As'adi, SE
        2. Sub Bidang Pertanian: Ir. Siti Sumi'ah, MM
    6. Bidang Sosial dan Budaya: Drs. Wahyu Sri Herwati, MPHR
        1. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial: Mashudi, SE

2. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan: Suwati, SAP

7. Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan: Sugeng Widodo, S. Sos

1. Sub Bidang Pemerintahan : Nurhayati, SE

2. Sub Bidang Kemasyarakatan: Nur Wahyu Indah L, SE

Staf BAPPEDA:

ISLATIFAH, SE

WIGATI, SE

MUSTOFA MUKHTAR, SH

ABDUL ROFI', SH

Drh. IDA SURYAWATI, M.Ec.Dev

MARIA YOURETHA SYLVI, SE,MM

TRI SUSWATI

SUPRAPTIK, SE

DINAR DWI ANDHI, ST

HARIATI, S.Si

ROSY FAJAR OKTO WASANA, ST

TRI ANDAYANI, STP

M. SA'RONI, S.Pd

EKO YUWONO, ST

EDI WIYONO, SE

NURUL SISWANTO,S.Si

MELASISCA YUNANDA L, ST

ADITYA NURMAWAN, S.Kom

ENDAH LISDIANA AMBARWATI, SP

ANANG TEGUH APRILIANTO, ST

ENDAH ISMAWATI, ST

WASI SETO WICONO, SE

RIZAL BAGUS PERMANA, SE

AZAM WISMANTARA, SE

HENDRA RANTUNG

CHOIRUL HUDA

RATNA SULISTIYOWATI

MUNASIR

SRI KUNCORO

NARSO

SYLVIA HANDRIYANI

SUGENG RIYADI

HARIANTO

SUGENG RIYANTO

LISDIANA IKA R

RIYANTO

EKO SULISTIO

INDRA PRASETYO WAHYU UTOMO

EMMA PUTRI PURWANINGSIH

D. Gambaran Umum Kecamatan Turi

1. Kondisi Geografis

Secara geografis Kecamatan Turi terletak pada posisi terletak antara 7º 01' 30" LS - 7º06'30" LS dan 112º20'30" BT - 112º26'00" BT dengan batas wilayah administratif adalah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kalitengah, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Deket, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Lamongan, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sukodadi.

Luas wilayah Kecamatan Turi adalah 4.869,08 Ha atau sama dengan 2,69% luas Kabupaten Lamongan yang mana terdiri dari: tanah kering 470,74 Ha, tanah sawah 3.884,94 Ha, tanah pekarangan 478,25 Ha, dan lain-lain 35,08 Ha.

2. Kondisi Demografis

Kecamatan Turi yang luas wilayahnya 4.869,08 Ha, terdiri dari 19 desa, 53 dusun/dukuh, serta 253 RT dan 75 RW. Jumlah penduduk Kecamatan Turi pada tahun 2014 sebesar 59.047 jiwa, dengan rincian:

- Jumlah penduduk laki-laki : 29.514 jiwa
- Jumlah penduduk perempuan : 29.533 jiwa

3. Potensi Hasil Olahan

a. Desa Tawangrejo : Telor asin

b. Desa Bambang : Telor asin

c. Desa Balun : Otak-otak bandeng

d.Desa Wangunrejo : Krupuk

e. Desa Turi : Tas enceng gondok

f. Desa Pomahan : Kopyah dan tas

g. Desa Kemlagigede : pembuatan tempe

h. Desa Geger : Roti goreng dan lompia.

E. Gambaran Umum Desa Tawangrejo

1. Kondisi Geografis

Secara geografis Desa Tawangrejo terletak pada posisi 7,5 º -7,6 º Lintang Selatan dan 112 º - 112,15 º Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa dataran rendah yaitu ±7 meter di atas permukaan air laut.

Secara administratif, Desa Tawangrejo terletak di wilayah Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa – desa tetangga, yakni:

a. Di sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Kemlagi Gede Kecamatan Turi.

b. Di sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Turi Kecamatan Turi.

c. Di sebelah Selatan berbatasn dengan : - Desa Sukorejo Kecamatan Turi, dan
- Desa Ploso Wahyu Kecamatan Lamongan.

d. Di sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Tambakploso Kecamatan Turi.

Jarak tempuh Desa Tawangrejo ke ibu kota kecamatan adalah ±4 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 20 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah ±10 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam.

2. Kondisi Demografis

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2013, jumlah penduduk Desa Tawangrejo adalah terdiri dari 846 KK, dengan jumlah total 3.301 jiwa, dengan rincian 1.654 laki-laki dan 1.647 perempuan sebagaimana tertera dalam Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia dibawah ini:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1.	0-4	73 orang	75 orang	148 orang	4,5 %
2.	5-9	55 orang	56 orang	111 orang	3,4 %
3.	10-14	102 orang	99 orang	201 orang	6,1 %
4.	15-19	134 orang	131 orang	265 orang	8,0 %
5.	20-24	119 orang	112 orang	231 orang	7,0 %
6.	25-29	143 orang	145 orang	288 orang	8,7 %
7.	30-34	167 orang	169 orang	336 orang	10,2 %
8.	35-39	149 orang	151 orang	300 orang	9,1 %
9.	40-44	150 orang	149 orang	299 orang	9,1 %
10.	45-49	138 orang	140 orang	278 orang	8,4 %
11.	50-54	106 orang	101 orang	207 orang	6,3 %
12.	55-59	91 orang	88 orang	179 orang	5,4 %
13.	>59	227 orang	231 orang	458 orang	13,9 %
Jumlah Total		**1.654 orang**	**1.647 orang**	**3.301 orang**	**100,0 %**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk Desa Tawangrejo paling banyak berusia diatas 59 tahun yang mana usia tersebut bukan usia

produktif untuk bekerja. Sedangkan usia produktif (30-34 tahun) menempati urutan kedua.

Berdasarkan data kesejahteraan penduduk Desa Tawangrejo, dari jumlah 846 KK tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Keluarga Pra Sejahtera sejumlah 168 KK;
2. Keluarga Sejahtera I sejumlah 297 KK;
3. Keluarga Sejahtera II sejumlah 177 KK;
4. Keluarga Sejahtera III sejumlah 118 KK;
5. Keluarga Sejahtera III plus sejumlah 86 KK.

3. Potensi Desa

Desa Tawangrejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan ini mempunyai potensi agraris, 80% wilayahnya merupakan lahan pertanian, 40% penduduk bermata pencaharian sebagai petani, 45% peternak, sedangkan penduduk bermata pencaharian selain bertani dan beternak hanya 15%, terdiri dari pedagang 5%, PNS 4%, lain-lain 6%.

Jumlah peternak itik Desa Tawangrejo 306 KK dengan jumlah 24.570 ekor. Adapun produksi telur pada tahun 2010 adalah 228.186 kg dan daging 11.048 kg. Dari produksi tersebut di topang nilai pakan secara lokal 80% dari ikan cepre dan besusul serta lepok dan 20% dari dadak halus, yang terkoordinir dalam satu usaha pakan itik di desa. Pemasaran produksi daging 11.048 kg dan

telur 228.186 kg keluar daerah, sedangkan DOC sebesar 15.990 ekor untuk kebutuhan sendiri maupun luar daerah yang ditetaskan secara alami, memakai ayam, juga menggunakan alat mesin penetas.

Adapun pengolahan hasil telur asin terdapat 10 orang pengrajin dengan produksi ±50 kg per hari yang di pasarkan untuk konsumsi masyarakat setempat dan keluar desa. Selain peningkatan produksi pengembangan usaha ekonomi kreatif berbasis budidaya itik pada kelompok wanita tani ternak Sumber Rejeki Desa Tawangrejo Kecamatan Turi memberikan konstribusi penurunan angka kemiskinan pada tahun 2006 sebesar 272 KK miskin, pada tahun 2009 turun menjadi 179 KK miskin dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (kesehatan masyarakat dan perbaikan gizi)

UNIVERSITAS BRAWIJAYA repository.ub.ac.id

4. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

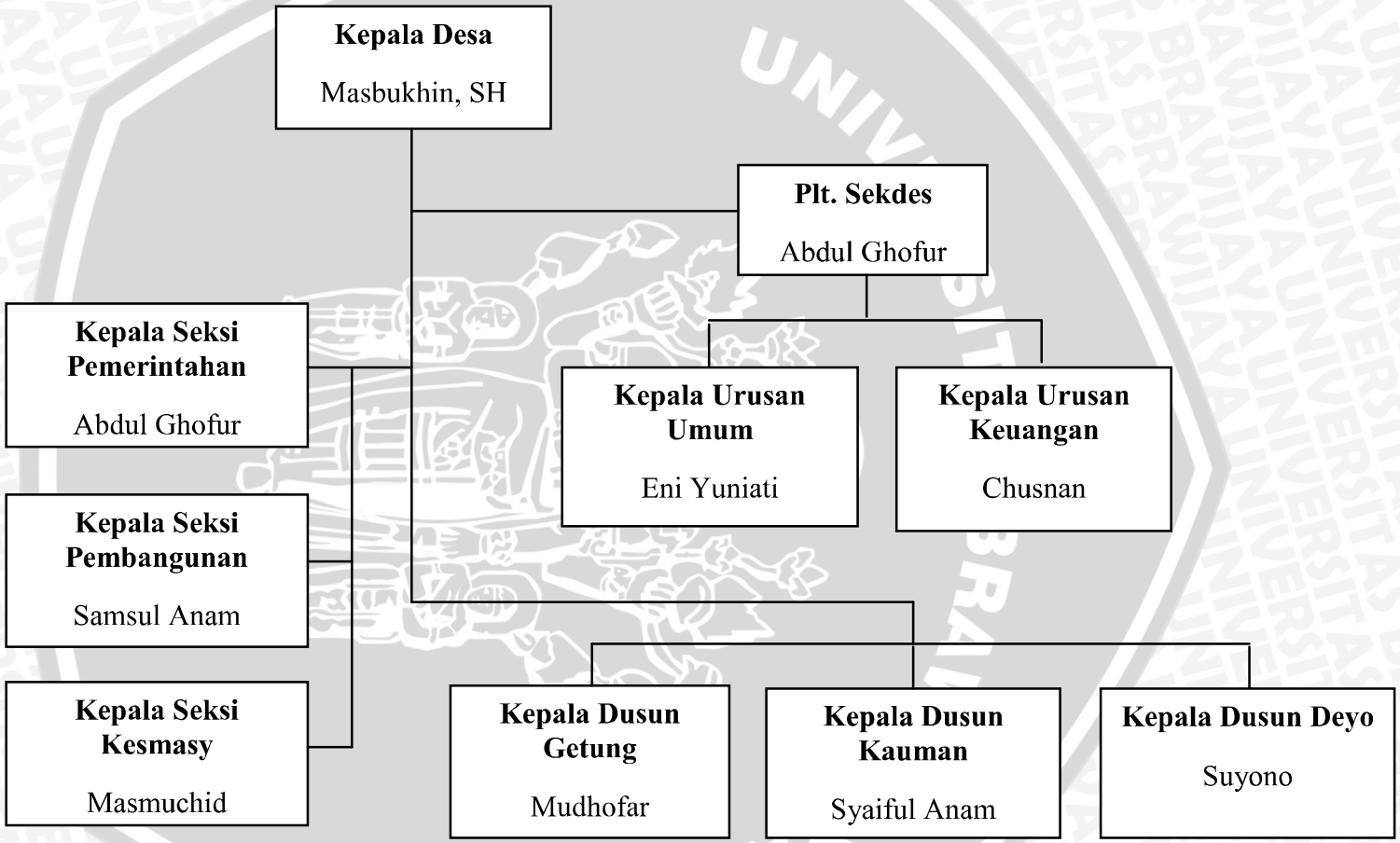

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tawangrejo(Sumber: Profil Desa Tawangrejo)

F. Profil Kelompok Tani Ternak Itik "SUMBER REJEKI"

1. Sasaran

1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
2) Lestarinya potensi sumber daya lokal untuk mendukung peternakan.
3) Terwujudnya produk bersih peternakan itik yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) untuk masyarakat.
4) Lahirnya generasi manusia yang cerdas, kuat, dan berdaya saing di era global.

Dengan harapan dimasa mendatang lebih berkembang sebagai ekonomi kreatif peternakan itik, yang mampu bersaing dan menjadikan kaum wanita lebih produktif di Desa Tawangrejo khususnya, Kelompok "Sumber Rejeki".

2. Motto Kelompok

"JAYA TERLAKSANA KELOMPOKKU, MANDIRI DAN SEJAHTERA KELUARGAKU, LESTARI LINGKUNGANKU"

3. Keadaan Umum Kelompok

Kelompok Tani Ternak Itik "SUMBER REJEKI" berlokasi di Desa Tawangrejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, sudah sejak lama secara

turun – temurun yang memiliki pengurus perempuan, dengan adanya musyawarah para pengurus yang dipelopori oleh tokoh masyarakat setempat sehingga pada tanggal 21 Maret 2006 ditetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Tawangrejo dalam pembentukan kelompok tani ternak wanita SUMBER REJEKI yang beranggotakan 18 orang dengan jumlah populasi ternak 5.670 ekor serta mendapat pengukuhan sebagai kelompok kelas "PEMULA".

Seiring waktu berjalan kelompok ternak Sumber Rejeki bertambah jumlah anggotanya yang diikuti peningkatan jumlah kepemilikan ternak atau populasi itik setiap anggota, pada tanggal 25 Agustus 2009 kelompok tani ternak itik Sumber Rejeki yang beranggotakan 25 orang dengan jumlah populasi 17.425 ekor mendapat pengukuhan sebagai kelompok kelas "LANJUT".

Pada tanggal 07 Desember 2011 kelompok tani ternak Sumber Rejeki yang beranggotakan 40 orang dengan jumlah populasi 24.570 ekor mendapatkan pengukuhan sebagai kelompok kelas "MADYA". Sampai saat ini kelompok tani ternak Sumber Rejeki telah tumbuh berkembang yang beranggotakan 95 orang dengan jumlah populasi 43.294 ekor.

4. Lokasi Usaha

Lokasi kandang itik ada di masing – masing anggota kelompok, disamping itu ada dua buah kandang komunal kelompok "SUMBER REJEKI" menempati lokasi persawahan seluas 700 m^2.

5. Sarana Prasarana Kelompok

Tabel 4.2 Sarana Prasarana Kelompok

No	Jenis	Jumlah
1.	Kandang Kelompok	2 Unit
2.	Mesin Tetas	18 Unit
3.	Alat Pengering Pakan	1 Unit
4.	Gudang Pakan	2 Unit
5.	Gudang Peralatan	2 Unit
6.	Tempat Penyimpanan Sementara Hasil Panen Telur	1 Unit
7.	Tempat Proses Pengasinan Telur	3 Unit
8.	Kios Sapronak	1 Unit
9.	Pasar Itik	1 Unit
10.	Kantor Koperasi Dan Kelompok	1 Unit
11.	Alat Pengolah Pakan/ *Feed Mill*	1 Unit
12.	Timbangan Pakan	1 Unit

13.	*Hand Sprayer*	3 Unit

6. Aspek Kelembagaan

Kelompok ini telah berdiri sejak 21 Maret 2006, pengukuhan secara resmi tanggal 10 April 2012 bersamaan dengan musyawarah anggota serta pembentukkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi. Sejak musyawarah anggota diputuskan tanggal 10 April 2012 hingga saat ini organisasi memiliki struktur pengurus kelompok berupa ketua kelompok, sekretaris kelompok dan bendahara. Dalam pelaksanaannya, pengurus pokok membentuk seksi – seksi berdasarkan kebutuhan dengan melihat perkembangan organisasi yang diputuskan lewat rapat rutin anggota. Rapat rutin anggota dilakukan minimal sekali dalam satu bulan untuk membahas perkembangan dan permasalahan yang dihadapi organisasi serta anggota sedini mungkin.

Ketua kelompok merupakan pimpinan yang bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukan oleh kelompok beserta seluruh anggotanya dalam konteks kelompok, sedangkan sekretaris memiliki tugas adminisstratif kelompok selain melakukan pencatatan dalam setiap agenda rapat rutin anggota. Bendahara adalah pengurus yang mempunyai kewenangan mengenai masalah sirkulasi keuangan kelompok. Saat ini seksi – seksi yang ada adalah seksi permodalan, seksi pembibitan, seksi sarana produksi ternak, seksi

kesehatan hewan dan seksi pemasaran. Seksi – seksi ini mempunyai tugas sesuai seksinya dan apabila mempunyai hambatan di dalam kelompok selalu dipecahkan dengan jalan musyawarah kelompok yang dilakukan di dalam pertemuan kelompok pada minggu pertama setiap bulannya.

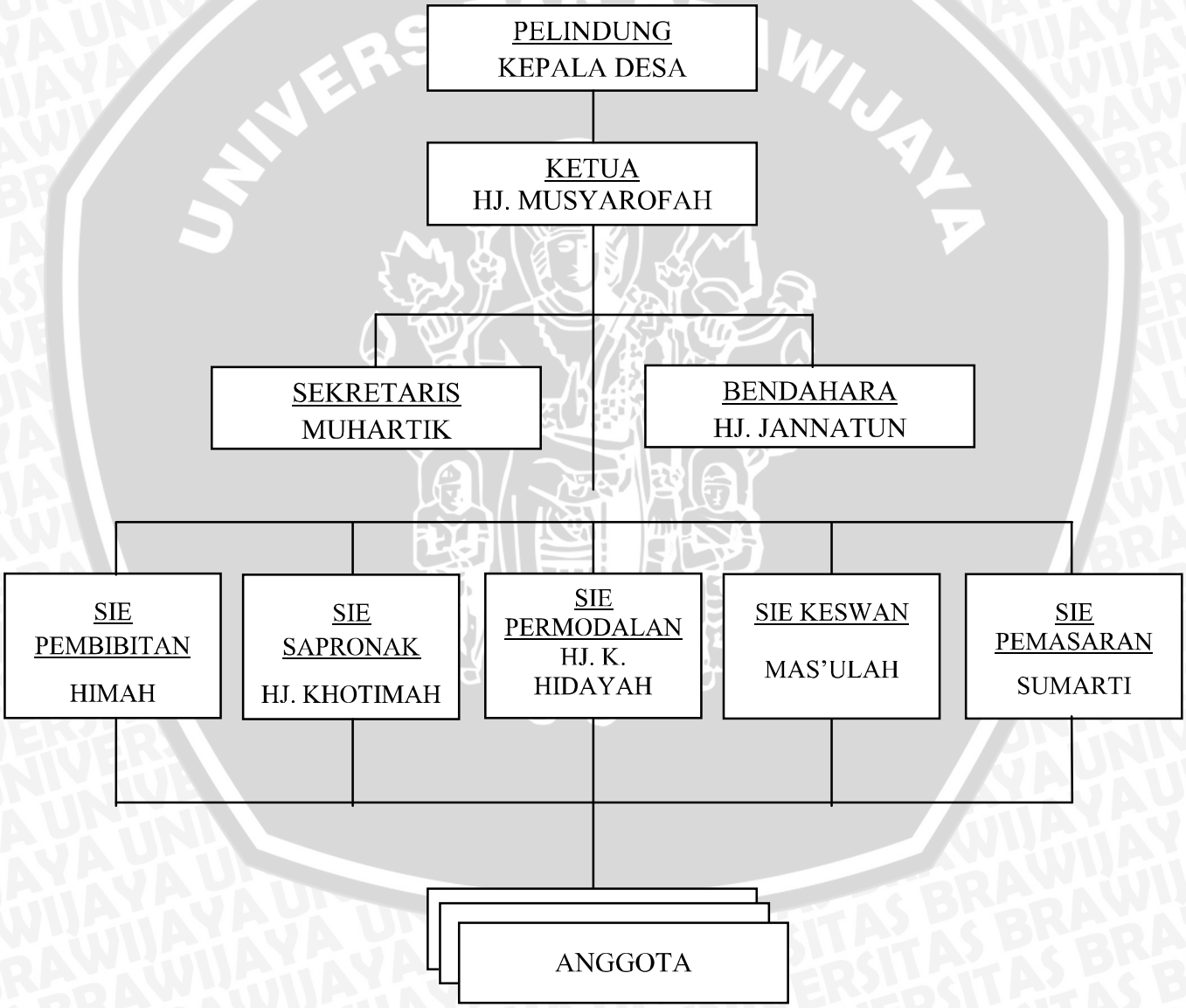

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kelompok Tani Ternak Sumber Rejeki
Sumber: Profil Kelompok Tani Ternak Itik Sumber Rejeki(2013)

Program Kerja Jangka Panjang Kelompok

a) Terciptanya organisasi yang mantap dan tangguh.

b) Terciptanya persediaan pakan yang diprodukai sendiri.

c) Terlaksananya pembuatan bibit berciri khas kelompok "SUMBER REJEKI".

d) Terciptanya kawasan sentra peternak itik.

e) Terlaksananya pengolahan daging dan telur yang spesifik lokal.

f) Terciptanya penerapan inovasi dan teknologi di bidang ternak itik.

g) Terciptanya kemandirian kelompok dengan menerapkan sistem agribisnis.

G. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Implementasi Kebijakan Program GEMERLAP sebagai Inovasi dalam Rangka Memberdayakan Masyarakat Pedesaan di Desa Tawangrejo, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan

a. Standar dan Tujuan

Implementasi kebijakan GEMERLAP berpijak pada Peraturan Bupati Lamongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan (GEMERLAP) di Kabupaten Lamongan. Pelaksanaan GEMERLAP secara keseluruhan mengacu pada Pedoman Umum Pelaksanaan GEMERLAP dan Petunjuk

Pelaksanaan (Juklak) GEMERLAP mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Sedangkan di Desa Tawangrejo sendiri untuk menjalankan program GEMERLAP mengacu pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Peternakan Itik dan Petunjuk Teknis Pengembangan Budidaya Itik. Nantinya kedua buku tersebut dapat menjadi pedoman bagi tim yang langsung terjun ke kelompok sasaran dan juga kelompok sasaran dalam hal pengelolaan potensi yang dimiliki.

Berdasarkan Pedoman Umum Pelaksanaan GEMERLAP dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) GEMERLAP tujuan utama program yaitu menggerakkan ekonomi masyarakat pedesaan melalui pemberian bantuan modal (hibah/pinjaman) bergulir, dengan mengefektifkan kelompok-kelompok usaha pedesaan yang sudah ada sebagai basis inovasi. Dari tujuan tersebut maka yang membedakan Program GEMERLAP dengan program lainnya misalnya saja program nasional seperti PNPM terletak pada sasaran program. Sasaran dari GEMERLAP itu masyarakat desa yang sudah mempunyai usaha mandiri dan memungkinkan untuk dikembangkan menjadi usaha masyarakat desa yang nantinya bisa menjadi produk unggulan desa. Sedangkan PNPM sasarannya adalah masyarakat miskin. Hal ini dimaksudkan supaya tingkat keberhasilan program itu bisa tinggi. Selain itu, dengan adanya program GEMERLAP diharapkan dapat merangsang kegiatan ekonomi lokal sehingga ekonomi pedesaan dapat terangkat dan sejajar dengan perkotaan. Sebagaimana yang dituturkan oleh Ibu Siti selaku anggota Tim Koordinator GEMERLAP:

> "GEMERLAP itu program inovasi pemerintah daerah. Inovasinya itu tidak seperti program reguler seperti PNPM yang selama ini sasarannya itu masyarakat miskin di semua desa berdasarkan usulan dari musrenbang, akan tetapi GEMERLAP selain usulan kelompok, kita (tim) akan memverifikasi desa mana yang benar-benar mempunyai potensi atau embrio yang siap untuk dikembangkan. Hal ini dikarenakan perbedaan GEMERLAP dengan program lainnya itu *mbak* sasarannya harus ada embrio. Maksud embrio disini itu sudah memulai usaha tapi dalam ukuran skala kecil baru kita (tim) bantu. Kalau belum ada embrio dikawatirkan tingkat kegagalannya sangat tinggi."(Wawancara pada hari Selasa, 28 Januari pukul 09.00 di Bappeda Kabupaten Lamongan).

Hal ini dijelaskan pula oleh Bapak Henry Selaku anggota Tim Teknis GEMERLAP:

> "GEMERLAP itu tidak diperuntukkan bagi warga miskin, tidak seperti PNPM. GEMERLAP dikhususkan untuk ekonomi lokal, jadi untuk menstimulus kegiatn ekonomi lokal yang kurang berkembang diberi program GEMERLAP untuk mengangkat ekonomi pedesaan." (Wawancara pada hari Senin, 17 Februari 2014 pukul 10.00 di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan).

Sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka untuk memilih sasaran yang sesuai dengan program dibutuhkan beberapa kriteria. Beberapa kriteria yang termuat dalam Pedoman Umum Pelaksanaan GEMERLAP dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) GEMERLAP adalah kriteria mengenai lokasi dan calon penerima bantuan secara umum, meliputi:

a. Kriteria Lokasi Program

Kriteria lokasi program meliputi:

1) Satuan tingkat pemerintahan desa/pedesaan;

2) Desa yang memiliki potensi SDA yang mendukung keberlangsungan program dan memiliki usaha kelompok;
3) Desa yang memilki cukup lokasi usaha, akses jalan, dan pemasaran usaha hasil.

b. Kriteria Calon Penerima Bantuan

Kualifikasi calon penerima bantuan meliputi:

1) Warga Lamongan dan bermukim di wilayah pedesaan dan dapat dibuktikan dengan KTP;
2) Memiliki usaha tapi dalam skala mikro/kecil;
3) Berada di lingkungan SDA yang mendukung usaha;
4) Memilki lahan usaha yang representatif;
5) Kualifikasi poin 1-4 harus masuk dalam usaha kelompok yang sudah terbentuk minimal 1 tahun.

Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Program GEMERLAP

Kriteria secara khusus yang berhubungan dengan pelaksanaan Program GEMERLAP dalam bidang peternakan itik termuat dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Peternakan Itik yang mana berisi tentang kriteria lokasi program dan kelompok sasaran khusus ternak itik yang meliputi:

a. Kriteria Lokasi:

1) Ketersediaan air yang cukup memadai untuk kebutuhan ternak.
2) Ketersediaan bahan pakan dari limbah perikanan, pertanian atau lainnya dalam jumlah cukup tersedia sebagai sumber energi protein pakan itik sehingga berpengaruh pada peningkatan kualitas dan produksi telur.
3) Ketersediaan listrik dan sarana transportasi yang cukup memadai untuk pemasaran produksi daging dan telur.
4) Tidak bertentangan dengan aspek kehidupan masyarakat.

b. Kriteria Kelompok Tani Peternak

1) Peternak harus mengerahkan usahanya pada budidaya itik.
2) Peternak diutamakan sudah tergabung dalam suatu kelompok ternak.
3) Peternak sudah berpengalaman dan mempunyai kemampuan yang cukup dalam membudidayakan ternak itik dengan baik serta mampu bekerjasama dengan baik dalam kelompok.
4) Diprioritaskan pada peternak yang mempunyai semangat partisipatif untuk melakukan *sharing* dalam bentuk tenaga kerja maupun penambahan kekurangan material yang diperlukan untuk penyempurnaan pembangunan perkandangan dan optimalisasi pakan.

5) Bersedia untuk dibina dan diarahkan oleh tim teknis dalam rangka pengembangan budidaya itik.
6) Pemeliharaan ternak itik konvensional/ semi intensif dilakukan di kandang masing-masing anggota kelompok dan pemeliharaan intensif dalam satu kandang kolektif.

Sumber: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Peternakan Itik

Berdasarkan data administratif, Desa Tawangrejo terletak di wilayah Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, dengan jarak tempuh ke ibu kota kecamatan adalah ±4 km. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah ±10 km. Penduduk Desa Tawangrejo 40% bermata pencaharian sebagai petani, 45% peternak, sedangkan penduduk bermata pencaharian selain bertani dan beternak hanya 15%, terdiri dari pedagang 5%, PNS 4%, lain-lain 6%.

Jumlah peternak itik Desa Tawangrejo 306 KK dengan jumlah 24.570 ekor. Adapun produksi telur pada tahun 2010 adalah 228.186 kg dan daging 11.048 kg. Peternak itik di Desa Tawangrejo tersebut telah tergabung dalam suatu kelompok usaha yang diberi nama Kelompok Tani Ternak Itik Sumber Rejeki. Kelompok ini sudah sejak lama secara turun – temurun yang memiliki pengurus perempuan . Kelompok ini telah berdiri sejak 21 Maret 2006 dengan ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa Tawangrejo dalam pembentukan kelompok tani ternak

wanita SUMBER REJEKI yang awalnya beranggotakan 18 orang dengan jumlah populasi ternak 5.670 ekor. Sampai saat ini kelompok tani ternak Sumber Rejeki telah tumbuh berkembang yang beranggotakan 95 orang dengan jumlah populasi 43.294 ekor.

b. Peran masing – masing Pelaksana atau Aktor Implementasi Kebijakan Program GEMERLAP

Pelaksana/implementator yang berperan dalam memberdayakan kelompok sasaran di Desa Tawangrejo Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lamongan

Bappeda Kabupaten/Kota merupakan instansi yang bergerak di bidang perencanaan pembangunan di daerah. Bappeda merupakan instansi pemerintah daerah yang mana bertindak sebagai koordinator GEMERLAP yang bertugas mengkoordinir pelaksanaan program mulai tahap perumusan sampai dengan pelaporan, meliputi:

a. merumuskan konsep kebijakan operasional, koordinasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan GEMERLAP;

b. mengkoordinasikan pelaksanaan GEMERLAP dengan SKPD terkait (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan);
c. mensinergikan kegiatan-kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan dengan GEMERLAP;
d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan GEMERLAP;
e. menilai hasil, manfaat, dan dampak pelaksanaan GEMERLAP;
f. mengusulkan pilihan-pilihan peningkatan efektivitas pelaksanaan GEMERLAP kepada pengarah (Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan);
g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan GEMERLAP kepada Bupati;
h. melakukan sosialisasi tingkat kabupaten;
i. memverifikasi Calon Penerima dan Calon Lokasi kebijakan GEMERLAP;
j. menetapkan calon penerima bersama SKPD Pelaksana dan pendamping.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Ibu Siti selaku anggota Tim Koordinator GEMERLAP:

'' Bappeda sebagai koordinator yang mewakili Pemerintah Daerah. Yang berperan sebagai pelaksana yaitu dinas SKPD terkait sesuai

> dengan program dan kegiatan. Kalau di Tawangrejo *ya* Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan. Bappeda tugasnya mengkoordinir pelaksanaannya seperti apa mulai dari perumusan sampai pelaporan. Jadi nanti ada monitoring dan evaluasi di Bappeda. Bappeda sebagai koordinator nanti melakukan monitoring ke lokasi. Disamping Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ada monev sendiri, sebagai koordinator kita ada tim. Dari hasil monitoring dan evaluasi tersebut kita dapat melihat efektif tidaknya pelaksanaan GEMERLAP. Sedangkan yang berperan mengusulkan pilihan-pilihan peningkatan efektivitas itu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Bappeda. Lalu nanti Bappeda melaporkan kepada Bupati. (Wawancara pada hari Selasa, 28 Januari pukul 09.00 di Bappeda Kabupaten Lamongan).

Di Desa Tawangrejo karena mempunyai potensi di bidang peternakan, Bappeda dalam mendampingi kelompok sasaran atau kelompok penerima bantuan itu dilakukan oleh pendamping. Maka dari itu pendamping itu berperan sebagai fasilitator yang mendampingi kelompok secara kelembagaan. Hal ini dikarenakan supaya aspek kelembagaan kelompok lebih kuat. Pendamping berasal dari *Non Government Organizations* (NGO's) yang sesuai dibidangnya. Misalnya saja di Tawangrejo NGO's dibidang peternakan. Selain melakukan pendampingan kelompok sasaran atau kelompok penerima bantuan, pendamping bertugas melaporkan hasil pendampingan kepada Bappeda setiap bulannya. Penentuan pendamping dilakukan oleh Bappeda. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan Ibu Siti selaku anggota Tim Koordinator GEMERLAP:

> " Pendamping itu berperan sebagai fasilitator yang mendampingi kelompok secara kelembagaan. Pendamping dikoordinir oleh Bappeda yang berasal dari NGO's supaya aspek kelembagaan kelompok lebih kuat. Cara penentuan pendamping itu setiap tahunnya dibuka pendaftaran *mbak*, nanti ada penentuan syarat-

syaratnya dan tim yang menentukan." (Wawancara pada hari Selasa, 28 Januari pukul 09.00 di Bappeda Kabupaten Lamongan).

Bappeda tidak bekerja sendiri melainkan bekerjasama dengan multi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sesuai dengan bidangnya. Di Desa Tawangrejo sendiri mempunyai potensi di bidang peternakan. Maka dari itu, Bappeda bekerjasama dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.

2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan merupakan instansi pemerintah yang bergerak di bidang peternakan paling rendah. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan instansi pemerintah yang dalam implementasi kebijakan GEMERLAP bertindak sebagai pelaksana kebijakan, maka dari itu Dinas Peternakan dan Kesehatan sering disebut sebagai SKPD pelaksana atau Tim Teknis. Adapun tugas dan tanggungjawab SKPD Pelaksana, yaitu:

a. menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) dengan mengacu pada Pedoman Umum (Pedum) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat dan usaha yang dikembangkan;
b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan GEMERLAP;
c. menilai hasil, manfaat, dan dampak pelaksanaan GEMERLAP;

d. mengusulkan pilihan-pilihan peningkatan efektivitas pelaksanaan GEMERLAP kepada pengarah (Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;

e. mengadakan sosialisasi tingkat kecamatan;

f. memverifikasi Calon Penerima dan Calon Lokasi kebijakan GEMERLAP;

g. menetapkan calon penerima;

h. mengusulkan hasil penetapan calon penerima kepada Bupati.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Bapak Henry selaku anggota Tim Teknis GEMERLAP:

> " Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan selaku Tim Teknis GEMERLAP. Karena kita SKPD Pelaksana, kita bertugas meng-*input* data dari UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan Lamongan, selanjutnya melaporkan hasilnya ke pimpinan GEMERLAP(Bappeda). Tugas Tim Teknis meliputi penjaringan CPCL, sosialisasi, monitoring. Monitoring yang dilakukan Tim Teknis itu secara terus-menerus, pada saat kelompok ingin melakukan pembelanjaan sampai selesainya pengelolaan bantuan, namun terfokusnya pada tengah-tengah pelaksanaan kebijakan. Sedangkan sosialisasi program GEMERLAP itu lewat musrenbang. Dan setiap bulan UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan Lamongan melaporkan ke kita (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan) kondisi di lapangan, setelah itu kita melakukan pelaporan ke Bappeda. Dinas mengusulkan untuk penetapan lokasi (penjaringan) dan calon penerima setelah itu nanti proposal masuk ke Bupati lalu Bupati mengeluarkan surat tembusan ke dinas. Lalu, dilakukan

verifikasi kelompok dilihat dari segi kelayakan, kita mengusulkan bahwa sekian puluhan kelompok siap menerima bantuan GEMERLAP." (Wawancara pada hari Senin, 17 Februari 2014 pukul 10.00 di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan).

UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan Lamongan yang ditunjuk oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai penanggungjawab pelaksana teknis GEMERLAP di Desa Tawangrejo. Tugas dan tanggungjawabnya yaitu membina kelompok usaha masyarakat dalam teknis mengelola bantuan yang diterima dari kebijakan GEMERLAP. Kemudian hasilnya dilaporkan kepada tim pelaksana, sekaligus mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi kelompok. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Henry selaku anggota Tim Teknis GEMERLAP:

"Untuk mengawasi di lapangan, ada UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan Lamongan sebagai penanggungjawab pelaksanaan teknis. UPT yang melakukan penjaringan calon penerima dan calon lokasi. Nanti hasilnya diserahkan UPT kepada Dinas. Melalui UPT, baik formal maupun non formal menyampaikan ke kelompok-kelompok peternak yang ingin dan mempunyai Sumber daya ekonomi lokal. UPT yang mendampingi peternak dalam bidang teknis pengelolaan sumber daya. Nanti dari situ, akan diketahui permasalahan-permasalahan kelompok dan UPT bisa memberikan solusi secara langsung maupun tidak langsung dengan membawa permasalahan tersebut ke Dinas untuk dibahas bersama tim." (Wawancara pada hari Senin, 17 Februari 2014 pukul 10.00 di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan).

c. Aktivitas Implementasi dan Komunikasi antar Organisasi

1) Sosialisasi

Sebelum diimplementasikannya program di Desa Tawangrejo, dilakukan sosialisasi terlebih dahulu untuk memberi informasi tentang adanya Program GEMERLAP serta memberi pemahaman tentang isi kebijakan tersebut kepada kelompok sasaran selaku calon penerima bantuan dan juga para pihak yang diharapkan membantu mensukseskan kebijakan GEMERLAP. Sosialisasi GEMERLAP itu dilaksanakan secara bertingkat, ada sosialisasi tingkat kabupaten dan sosialisasi tingkat kecamatan.

Sosialisasi tingkat kabupaten yang diadakan dua kali di tahun pertama program, BAPPEDA berperan sebagai pemateri bersama penasehat(Bupati dan wakilnya) dan pengarah(Sekretaris Daerah dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah). Materi yang disampaikan terkait dengan gambaran umum program yang termaktub dalam Buku Pedoman Umum dan Juklak GEMERLAP. Sosialisasi tingkat kabupaten dihadiri oleh Camat, SKPD Pelaksana, UPT Dinas Pelaksana, pendamping.

Sosialisasi tingkat kecamatan di Kecamatan Turi dilakukan pada tahun kedua program dengan tim turun ke kecamatan dengan penyampaian materi oleh BAPPEDA, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan Kecamatan Lamongan, pendamping. Materi yang disampaikan hampir sama dengan yang disampaikan pada waktu sosialisasi tingkat kabupaten yakni terkait dengan gambaran umum program yang termaktub dalam Buku Pedoman Umum dan Juklak GEMERLAP dan ditambahi dengan gambaran umum pengelolaan sumber daya atau potensi yang ada. Sosialisasi tingkat kecamatan dihadiri oleh Kepala Desa, tokoh masyarakat, dan kelompok calon penerima. Sosialisasi tingkat kecamatan biasanya dilaksanakan di pendopo kecamatan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Ibu Siti selaku anggota Tim Koordinator GEMERLAP:

> " Sosialisasi tingkat kabupaten di tahun pertama dua kali, yang menyampaikan sosialisasi tingkat kabupaten itu biasanya Bupati, kadang juga pengarah, ketua,sekretaris. Sedangkan sosialisasi tingkat kecamatan itu di tahun kedua program tim turun ke kecamatan-kecamatan. Nanti di kecamatan kita kumpulkan orang-orang di pendopo kecamatan. Materi yang disampaikan ditingkat Kabupaten dengan Kecamatan sedikit banyak sama. Sedangkan yang menyampaikan sosialisasi tingkat kecamatan itu tim. Jadi nanti kita minta bantuan kecamatan untuk mengundang kelompok dan kita yang memfasilitasi." (Wawancara pada hari Selasa, 28 Januari pukul 09.00 di Bappeda Kabupaten Lamongan).

Sosialisasi selain dilaksanakan dalam bentuk pertemuan juga dilaksanakan dengan sosialisasi melalui media elektronik maupun media cetak yang dilaksanakan pada tahun kedua program. Dan pada tahun ketiga bentuk sosialisasinya berupa pemasangan *billboard* di sepanjang jalan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Ibu Siti selaku anggota Tim Koordinator GEMERLAP:

> "Pada tahun kedua sosialisasinya melalui media elektronik maupun cetak. Untuk tahun ketiga bentuk sosialisasinya berupa pemasangan *billboard* disepanjang jalan." (Wawancara pada hari Selasa, 28 Januari pukul 09.00 di Bappeda Kabupaten Lamongan).

2) Penetapan Lokasi dan Calon Penerima

Penetapan kriteria lokasi sasaran program dan kualifikasi calon penerima bantuan ditetapkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan beserta pendamping, kemudian diusulkan kepada Bupati. Cara penetapan calon penerima bantuan sebagai berikut kelompok yang merasa telah memenuhi beberapa kriteria yang telah disebutkan dalam standar dan tujuan akan mengajukan proposal kepada Tim Teknis dengan mengetahui Camat, Kepala Desa, UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan Lamongan. Proposal tersebut dilengkapi dengan daftar nama anggota kelompok yang diusulkan sebagai calon penerima. Melalui UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan Lamongan, proposal tersebut dibawa ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Tim Teknis). Proposal yang masuk ke Tim Teknis itu banyak, maka dari itu tidak semua bisa terakomodir untuk direalisasikan pada tahun proposal diterima. Maka dari itu, dilakukan inventarisasi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL). Dengan demikian, maka proposal yang terlebih dahulu dicatat akan ditindak lanjuti. Hal ini sesuai dengan keterangan dari Bapak Henry selaku anggota Tim Teknis GEMERLAP:

> "Awalnya kita melakukan inventarisasi calon penerima dan calon lokasinya berdasarkan proposal yang diajukan kelompok calon penerima yang dibawa oleh UPT." (Wawancara pada hari Senin, 17 Februari 2014 pukul 10.00 di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan).

Kemudian, ditindak lanjuti dengan pernyataan dari Ibu Siti selaku anggota Tim Koordinator GEMERLAP:

> "Prosedur pelaksanaan kelompok mengajukan usulan ke SKPD teknis. Dari SKPD itu tadi usulan yang berasal dari kelompok banyak *mbak* jadi tidak semua terakomodir jadi tahun itu juga. Jadi nanti di cek *list* mana usulan yang lebih dulu masuk. yang bertugas untuk cek *list* itu SKPD teknis, lalu nanti koordinasi dengan Bappeda." (Wawancara pada hari Selasa, 28 Januari pukul 09.00 di Bappeda Kabupaten Lamongan).

Wujud dari tindak lanjut terhadap proposal yang telah dipilah-pilah adalah verifikasi calon penerima dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui keadaan yang terjadi di lapangan apakah sesuai dengan proposal yang diajukan atau tidak. Verifikasi dilakukan oleh Tim Verifikasi yang terdiri dari SKPD Pelaksana dan pendamping. Kemudian, hasil verifikasi dilaporkan kepada Sekretariat GEMERLAP (Bappeda). Setelah proses verifikasi maka ditetapkan calon penerima oleh Bappeda, SKPD Pelaksana, dan pendamping. Kemudian, hasilnya diusulkan oleh SKPD Pelaksana kepada Bupati sebagai penerima bantuan hibah. Dan Bupati menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang lokasi dan penerima bantuan dengan tembusan kepada SKPD Pelaksana. Setelah itu dilakukan pembuatan rekening kelompok oleh Tim Teknis sebagai sarana penyaluran bantuan.

3) Pembinaan

Kelompok Tani Ternak Itik Sumber Rejeki setelah mendapatkan SK diberi pembinaan dengan melakukan pelatihan-pelatihan, yakni pelatihan wirausaha (*capacity building*) dan penguatan kelembagaan usaha (*institusional building*). Metode yang dipakai dalam pelatihan yaitu dengan ceramah, dialog, tanya-jawab, demonstrasi, dan penugasan. Pelatihan diselenggarakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan dengan melibatkan pendamping bersama UPT Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan Lamongan. Narasumber pelatihan diambil dari pakar, praktisi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan dan dipandu oleh pendamping selaku fasilitator pelatihan. Adapun pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti kelompok penerima di Desa Tawangrejo meliputi:

1. Pelatihan Pembuatan Pakan Ternak berbasis Teknologi Tepat Guna yang diselenggarakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan pada tanggal 07 Juli 2011 dengan jumlah anggota yang mengikuti sebanyak 20 orang anggota kelompok;

2. Pelatihan Organisasi Kelompok Tani Ternak yang diselenggarakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan pada tanggal 21 Juli 2011 dengan jumlah anggota yang mengikuti sebanyak 20 orang anggota kelompok;

3. Pelatihan Tehnis Industri Peningkatan Mutu dan Desain Kemasan Industri Kecil Telur Asin yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kabupaten Lamongan pada tanggal 15 Maret 2011 dengan jumlah anggota yang ikut 3 orang anggota kelompok.

4. Pelatihan Pembuatan Pakan Ternak berbasis Teknologi Tepat Guna yang diselenggarakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan pada tanggal 25 Nopember 2011 dengan jumlah anggota yang mengikuti sebanyak 40 orang anggota kelompok.

Sumber: Profil Kelompok Tani Ternak Itik Sumber Rejeki(2013)

Pelatihan atau pembinaan pada kelompok di Desa Tawangrejo biasanya diadakan di balai desa dan sekretariat kelompok. Selain pembinaan secara formal dengan cara pelatihan-pelatihan, pembinaan juga dilakukan non-formal secara tersirat. Misalnya saja apabila kelompok mengalami permasalahan langsung menelfon Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hal ini sesuai dengan keterangan dari Bapak Henry selaku anggota Tim Teknis GEMERLAP:

> " Pembinaan di lakukan di balai desa atau disekretariat kelompok kalau memungkinkan. Pembinaan non formal tidak melibatkan orang banyak biasanya langsung telpon. Jadi kelompok tidak segan-segan untuk melapor permasalahan yang terjadi." (Wawancara pada hari Senin, 17 Februari 2014 pukul 10.00 di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan).